



[RENSTRA]

# RENCANA STRATEGIS

| 2017-2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra tahun 2017 – 2022 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat.

Paradigma perencanaan dan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan dan pembangunan infrastruktur memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi OPD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Strategis (Renstra - OPD) adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13 tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standart pelayanan minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
10. Peraturan Menteri PEKERJAAN UMUM Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien selama 5 tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, adalah :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2017 - 2022 untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
3. Memberikan pedoman dan alat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017-2022.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat meliputi lima bab pembahasan sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini mendeskripsikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Bab ini mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, strategi serta kebijakan.

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

Dengan fungsi :

- perumusan kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sekretaris, dengan fungsi;

- pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- pelayanan administrasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan fungsi;

- pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Perencanaan, dengan fungsi :

- penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan, dengan fungsi:

- pengelolaan administrasi keuangan;
- menyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan



- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pengairan, terdiri dari;

1. Kepala Bidang Pengairan, dengan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengairan;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengairan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang pengairan.

2. Seksi Irigasi, dengan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan di bidang irigasi;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada seksi irigasi.

3. Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi, dengan fungsi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengendalian banjir dan abrasi;

4. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat dengan fungsi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;

- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Seksi pemeliharaan dan bina manfaat.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Bina Marga, dengan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang bina marga;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang bina marga; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang bina marga;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang peningkatan jalan dan jembatan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang peningkatan jalan dan jembatan.

4. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan, dengan fungsi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
  - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
  - menyiapkan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan; dan
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
  
- e. Bidang Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Cipta Karya, dengan fungsi:
    - menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
    - penyusunan rencana dan program kerja di bidang cipta karya;
    - pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang cipta karya; dan
    - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang cipta karya
  
  2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan fungsi:
    - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
    - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
    - menyiapkan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
    - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan bangunan dan lingkungan.
  
  3. Seksi Penyediaan Air Minum, dengan fungsi:
    - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan air minum;
    - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan air minum;

- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyediaan air minum;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan air minum.
4. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
  - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
  - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penyehatan lingkungan permukiman
- f. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - penyusunan rencana dan program kerja di bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengembangan kawasan permukiman.

3. Seksi Perumahan, dengan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang perumahan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang perumahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang perumahan.

4. Seksi Penataan Ruang, dengan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penataan ruang;
- penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penataan ruang; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan ruang.

g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pertanahan, dengan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang pertanahan;
- penyusunan rencana dan program kerja di bidang bidang pertanahan;
- pelaksanaan dan pengkoordinasian program bidang pertanahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang pertanahan.

2. Seksi Penyediaan Pertanahan, dengan fungsi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pertanahan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan;

- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyediaan pertanahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyediaan pertanahan.

3. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dengan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
- perencanaan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelesaian sengketa pertanahan.

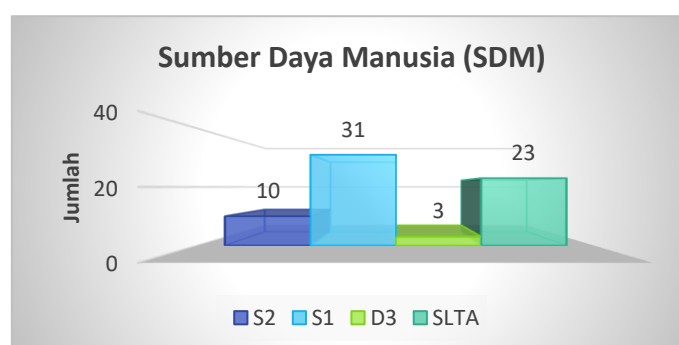
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu sebagai penanggung jawab operasional dan pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Personil

Dalam rangka menunjang kegiatan, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sebanyak 67 orang pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari 10 orang Sarjana Strata II (S2), 31 orang Sarjana Strata I (S1), 3 orang Diploma Strata III (D3), 23 jenjang pendidikan SLTA sederajat.

Grafik Sumber Daya Manusia



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa :

Prasarana yang ada terdiri dari :

- a. Bangunan Kantor : 1 unit
- b. Bangunan workshop dan laboratorium : 1 unit

Sarana yang ada terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 3 unit
- c. Alat berat sampai Desember 2016 berupa Exavator 1 unit, Wheel Loader 1 unit, Backhoe Loader 1 unit.
- d. Peralatan kantor berupa komputer 10 unit, printer 5 unit.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada pencapaian indicator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Lampung Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			66,39 %	18 unit gedung	19 unit gedung	19 unit gedung	18 unit gedung	18 unit gedung	15 unit gedung	4 unit gedung	7 unit gedung	18 unit gedung	10 unit gedung	83,3	21,1	36,8	100	55,56
2	Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan			60,00 %	12,2 km pemb. Jalan	15 km pemb. Jalan	15 km pemb. Jalan	15 km pemb. Jalan	12,2 km pemb. Jalan	40,06 km pemb. Jalan	5,41 km pemb. Jalan	17,2 km pemb. Jalan	3,66 km pemb. Jalan	11,08 km pemb. Jalan	328,4	36,1	114,7	24,4	90,8
					40 km peningkatan jalan	48 km peningkatan jalan	48 km peningkatan jalan	48 km peningkatan jalan	45,16 km peningkatan jalan	124,8 km peningkatan jalan	36,72 km peningkatan jalan	32,28 km peningkatan jalan	139,99 km peningkatan jalan	58,19 km peningkatan jalan	312	76,5	67,3	291,6	128,9
					6 unit jembatan	6 unit jembatan	6 unit jembatan	6 unit jembatan	6 unit jembatan	4 unit jembatan	10 unit jembatan	7 unit jembatan	5 unit jembatan	6 unit jembatan	66,7	166,7	116,7	83,3	100



3	Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong			75,00 %	1 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	100	50	50	50	75
4	Meningkatnya pembangunan turap /talud/ bronjong			65,00 %	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	-	14,3	28,6	28,6	42,86	-
5	Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan			60,00 %	1 unit jembatan , 10 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 15 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 15 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 20 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 25 ruas pem. Jalan rusak	10 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 3 ruas pem. Jalan rusak	8 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 11 ruas pem. Jalan rusak	1 unit jembatan , 12 ruas pem. Jalan rusak	0 100	28,6 100	28,6 0	0 100	100 48,00
6	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan dan jembatan			60,00 %	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Terlaksananya penanggulangan tanggap darurat jalan dan jembatan			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Tersedianya pengembangan sistem informasi/			100%		1 dokumen database	1 dokumen database	1 dokumen database		1 dokumen database jalan	1 dokumen database	1 dokumen database	1 dokumen database			100	100	100	

	database jalan dan jembatan									lingkungan		jalan lingkungan							
9	Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan				1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.			42,00 %	230 ha	240 ha	240 ha	244,87 ha	240 ha	382 ha	310 ha	332 ha	422 ha	422 ha	166,1	129,2	138,3	172,3	100
11	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			78,84 %	27%	37%	47%	57%	67%	37%	47%	45%	51%	68%	137	127	95,7	89,5	101,5
12	Meningkatnya pembangunan pengendalian banjir			35 %	12 lokasi	16 lokasi	15 lokasi	14 lokasi	14 lokasi	10 lokasi	4 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	13 lokasi	83,3	25	53,3	64,3	92,86
13	Tersedianya pengembangan wilayah			79,27 %		1 dok perenc.	1 dok perenc.	1 dok perenc.			-	-	-			-	-	-	

	strategis dan cepat tumbuh																		
14	Meningkatnya sarana pembangunan infrastruktur perdesaan			27,52 %	34% air baku, 25 jalan ling kungan	43% air baku, 25 jalan ling kungan	51% air baku, 25 jalan ling kungan	60% air baku, 25 jalan ling kungan	68,87% air baku, 25 jalan ling kungan	34% air baku, 54 jalan ling kungan	43% air baku, 60 jalan ling kungan	51% air baku, 65 jalan ling kungan	60% air baku, 63 jalan ling kungan	73% air baku, 92 jalan lingku ngan	100	100	100	100	106
15	Terseleng garanya sarana pengembangan perumahan			3,92		5 keca- matan	5 keca- matan	5 keca- matan	5 keca- matan				5 keca- matan		0	0	0	100	
16	Tersedianya perencanaan tata ruang					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokume n	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		50	50	50	50
17	Terseleng garanya program pengendalian pemanfaatan ruang			100	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	3 kali sosiali- sasi 3 kec	-	-	3 kali sosiali- sasi 3 kec	100	100	0	0	100
18	Terseleng garanya lingkungan sehat perumahan					1 kali sosiali- sasi, 5 unit sanitasi air bersih	1 kali sosiali- sasi, 10 unit sanitasi air bersih	1 kali sosiali- sasi, 15 unit sanitasi air bersih	1 kali sosiali- sasi, 15 unit sanitasi air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Lampung Barat Periode 2013 – 2017

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang- garan	Realisi- sasi
1	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.265	12.226	29.598	22.806	20.066	18.027	12.069	29.270	22.558	20.066	99	99	99	99	100	2,38	2,72
2	Program pembangunan jalan dan jembatan	78.949	53.062	75.316	144.789	122.824	74.530	51.904	74.235	143.647	122.824	94	98	99	99	100	11,68	13,3
3	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	1.000	1.450	1.944	4.382	3.400	3.400	1.446	1.928	4.360	3.400	340	100	99	99	100	35,79	20
4	Program pembangunan turap/talud/ bronjong	900	820	-	-	-	899	816	-	-	-	100	100	-	-	-	-8,89	-9,23
5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	2.900	1.840	5.515	2.137	6.300	2.854	1.762	5.418	2.099	6.300	98	96	98	98	100	21,4	21,89
6	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program penanggulangan tanggap darurat jalan dan jembatan	200	200	200	200	200	166	133	125	109	200	83	67	63	55	100	0	4,77

8	Program pengembangan sistem informasi/ database jalan dan jembatan	-	-	-	460	-	-	-	-	449	-	-	-	-	98	-	-	-
9	Program sarana dan prasarana kebinamargaan	100	145	20	112	200	91	142	20	85	200	91	98	100	76	100	18,92	21,76
10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	12.407	10.651	16.551	1.100	36.421	12.346	10.561	16.365	1.097	36.421	100	99	99	100	100	30,89	31,06
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	900	450	2.500	4.100	2.695	894	440	2.481	4.001	2.695	99	98	99	98	100	31,55	31,77
12	Program pengendalian banjir	6.250	1.425	5.600	8.250	12.100	6.201	1.416	5.561	8.059	12.100	99	99	99	98	100	17,96	18,19
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Program sarana pembangunan infrastruktur perdesaan	26.756	26.823	42.366	42.697	43.592	26.136	26.682	42.024	42.437	43.592	98	99	99	99	100	12,98	13,64

15	Program pengembangan perumahan	-	-	-	-	5.782	-	-	-	-	5.782	-	-	-	-	100	-	-
16	Program perencanaan tata ruang	-	115	-	370	370	-	83	-	314	370	-	72	-	85	100	47,63	64,58
17	Program pengendalian pemanfaatan ruang	200	95	275	-	115	188	80	253	-	115	94	84	92	-	100	- 12,92	-11,56
18	Program lingkungan sehat perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Program Perencanaan/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan	-	-	200	-	-	-	-	197	-	-	-	-	99	-	-	-	-

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan infrastruktur dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

### **1.1 Tantangan**

1. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
2. Wilayah yang luas dengan kondisi topografi dan geografis yang berbukit, tanah labil dan rawan bencana.
3. Pelaksanaan konstruksi fisik dengan kondisi alam yang kurang mendukung.
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
5. Minimnya dana yang tersedia.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

### **2.1 Peluang**

1. Adanya regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.
2. Situasi wilayah yang kondusif.
3. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar dinas/instansi.
4. Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana telekomunikasi.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pertanahan adalah sebagai berikut :

##### 1. Bidang Bina marga

Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permasalahan yang sering dihadapi adalah :

- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana
- Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung
- Geografis → Pegunungan, Struktur Tanah → tidak stabil

##### 2. Bidang Pengairan

Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu mengalami permasalahan :

- Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor
- Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau pendangkalan sungai.
- Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil karena kondisi alam yang berbukit-bukit

##### 3. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan :

- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan

##### 4. Bidang Ciptakarya

- Masih terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di beberapa kawasan permukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan.



## 5. Bidang Pertanahan

- Belum ada database pertanahan
- Dokumen asal usul tanah milik pemerintah tidak lengkap

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan memanfaatkan keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya maka Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

#### **“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**

Rumusan visi tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lampung Barat. Adapun penjelasan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Hebat : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

Sejahtera : Mengoptimalkan potensi yang ada bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat.

#### 2. Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan atau diemban oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi akan menjadi *direction* (arahan) untuk penjabaran tugas-tugas yang harus diemban oleh setiap satuan kerja yang ada di daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi 2017 - 2022 Kabupaten Lampung Barat, dirumuskan 5 Misi berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Untuk mendukung visi Bupati tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemban tugas mensukseskan misi 1 mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan Adapun tujuan dari kedua misi tersebut adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Hubungan Tujuan-Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
misi 1 : mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan			
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase rumah layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas perumahan
		Persentase pemukiman layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

### 3. Program

Sebagai upaya mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, maka program yang menjadi prioritas unggulan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Program Penuntasan Penanganan Jalan Kabupaten pada Ruas-ruas Jalan Utama, Penataan Kota dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung ditujukan dalam rangka keserasian dan sinkronisasi renstra-renstra Kementerian, Provinsi dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Sehingga dengan adanya telaah ini akan diketahui capaian sasaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah memberikan kontribusi terhadap sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 3.3.1. Infrastruktur jalan dan Transportasi

Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Sebelum merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu sistem jaringan yang ada dan dikaitkan dengan rencana sistem pusat-pusat perkotaan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

#### Jaringan Jalan Nasional

Jalan nasional lain adalah yang melintas dari Sumber Jaya sampai Liwa yang melintasi pusat perkotaan :

- a. PPL Tugusari (Sumberjaya)
- b. PKL Fajar Bulan (Way Tenong)
- c. PPL Bakhu (Batu Ketulis)

- d. PPK Kenali (Belalau)
- e. PPL Pekon Balak (Batu Brak)
- f. PKW Liwa (Balik Bukit)

#### Jaringan Jalan Provinsi

Jaringan Jalan Provinsi; adalah jalan yang menghubungkan Liwa-Batas Provinsi Sumatera Selatan dan antara Sukabumi dan Suoh.

- a. Ruas jalan yang menghubungkan PKW Kota Liwa dengan PKL Muara Dua (Ibukota Kabupaten OKU Selatan). Jalan ini melalui PPL Buay Nyerupa (Sukau dan kawasan wisata terpadu Danau Ranau)
- b. Ruas jalan yang menghubungkan PPL Pekon Balak (Kecamatan Batu Brak) dengan PKW Kota Agung (Kabupaten Tanggamus) yang melintasi PPK Sumber Agung (Kecamatan Suoh).
- c. Ruas Jalan Sukabumi-Suoh melalui PPL Sri Mulyo (Kecamatan Bandar Negeri Suoh).

#### Jaringan Jalan Kabupaten

Selain ruas jalan nasional dan provinsi di atas, selebihnya adalah jalan kabupaten yang secara status terdapat 163 Ruas jalan dengan panjang total 724,00 Km yang menghubungkan IKK ke masing-masing pekon (desa) pada tiap-tiap kecamatan.

#### Rencana pembangunan jalan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat berencana untuk membangun beberapa ruas jalan utama, diantaranya adalah :

- a. Jalan umum yang akan menjadi jalan lingkar Kota Liwa di bagian Utara, yaitu sebagai jalan alternatif yang menghubungkan Balik Bukit dengan Sukau.

- b. Jalan Umum yang menghubungkan IKK Sekincau (Pampangan) – IKK Basungan (Kecamatan Pagar Dewa) – IKK Banjit (Kabupaten Way Kanan).

### 3.3.2. Penataan Ruang

Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

### 3.3.3. Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi

Rencana pengembangan sumber daya air ke depan untuk Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- b. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan terutama di Suoh.
- c. Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di TNBBS, seperti Way Besai, Way Umpu, Way Semangka, Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji
- d. Peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di Sumber Jaya, Way Tenong, Sukau, Balik Bukit.
- e. Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Barat.
- f. Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Suoh dan Sukau.

- g. Pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di kecamatan Suoh untuk kepentingan pertanian tanaman pangan
- h. Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum (PAM) kawasan Bandar Negeri Suoh.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan dan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap.
- Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan.
- Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi.
- Belum optimalnya pelayanan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.
- Belum semua kawasan strategis memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan demi kepentingan masyarakat Lampung Barat.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### a. Prasarana Transportasi

Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permasalahan yang sering dihadapi adalah :

- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana
- Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung
- Geografis --- Pegunungan, Struktur Tanah --- tidak stabil.

#### b. Ketahanan Pangan

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya (irigasi) dengan sasaran peningkatan produksi hasil padi.

Tingginya intensitas dan frekuensi hujan menyebabkan seringnya terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan banjir pada daerah persawahan, permukiman dan merusak fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah, sekolah dan puskesmas. Kerusakan yang

ditimbulkan akibat banjir tersebut mengakibatkan terhambatnya aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas sosial lainnya serta rendahnya hasil produksi padi sawah sehingga menurunkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

#### c. Penyediaan Fasilitas Umum

Salah satu indikator tercapainya hasil pembangunan di daerah adalah dengan melihat tersedianya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasar.

Fasilitas umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, penyehatan ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, melalui program penyediaan fasilitas infrastruktur dalam menunjang pengembangan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman seperti kemudahan akses air bersih, pengelolaan persampahan, pengendalian daerah genangan air melalui pengelolaan drainase yang terkoneksi. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini pemerintah daerah dapat mengembangkan dan menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### d. Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengendalian Tata Ruang melalui penertiban IMB di wilayah perkotaan menindaklanjuti Perda RTRW Nomor 01 Tahun 2012 bahwa fungsi pengendalian pemanfaatan ruang harus diterapkan secara tegas dan arif sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kewenangan dalam pengendalian merupakan kewenangan bersama antar satuan kerja terkait dalam penerapan pengendaliannya untuk menunjang meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui pengendalian di berbagai sektor. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media sosialisasi dan kegiatan penataan ruang.

Peningkatan dan pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan untuk memberikan prasarana infrastruktur yang layak bagi daerah permukiman agar tercipta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman



Penataan kawasan pengembangan tata ruang berdasarkan pembagian zonasi sesuai amanat Perda RTRW Lampung Barat.

e. Aset Pertanahan Pemerintah Daerah

- Sebagian besar alas hak atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk fasilitas umum dan pemerintah belum tertib.
- Munculnya konflik pertanahan karena dokumen (alas hak) tanah pemerintah daerah tidak lengkap.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat mengacu dari visi dan misi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat Dan Sejahtera"*. Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat,cerdas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu " Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan".

Untuk mewujudkan misi kesatu tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi- misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun kedepan menetapkan tujuan :

1. Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
2. Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik;
3. Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan;
4. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan;

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan;
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
3. Meningkatnya kualitas perumahan;
4. Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman;
5. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)</li> <li>• Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)</li> </ul>	55,5 % 75,22%	62 % 78,22%	68 % 81,22%	74 % 84,22%	80 % 87,22%
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi berfungsi baik	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)</li> </ul>	45%	49%	53%	56%	60%
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perumahan</li> <li>• Meningkatkan kualitas prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rumah layak huni</li> <li>• Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)</li> </ul>	90,56% 71,25%	91,11% 78,27%	91,67% 85,29%	92,23% 91,01%	92,79% 98,17%

		sarana dan utilitas permukiman						
4.	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi dan kebijakan dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, visi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal untuk Menunjang Lampung Barat HEBAT” akan dapat dilaksanakan secara terarah.

Berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1 sampai dengan 4 pada tabel 3.1 dicapai melalui strategi dan kebijakan :

- Penyediaan dan pengolahan data dasar tiap-tiap sektor pembangunan meliputi data irigasi, jalan, jembatan, bangunan, sanitasi, air minum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan dalam penyusunan keterpaduan perencanaan antar program.
- Koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional dalam pencapaian sinergi pembangunan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan.

Sasaran 5 dicapai melalui strategi dan kebijakan

1. Penyediaan dan pengolahan data RTRW sebagai bahan penyusunan RDTRW.
2. Pengendalian dan penataan pemanfaatan ruang.
3. Koordinasi antar instansi terkait untuk peyebarluasan informasi RTRW kepada publik.

Visi	TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA		
Misi 1 :	Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pengolahan data dasar tiap-tiap sektor pembangunan meliputi data irigasi, jalan, jembatan, bangunan, sanitasi, air minum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan dalam penyusunan keterpaduan perencanaan antar program.</li> <li>2. Koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional dalam pencapaian sinergi pembangunan.</li> <li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan</li> </ol>	Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal
Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi berfungsi baik	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi		
Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas perumahan</li> <li>• Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman</li> </ul>		

Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan pengolahan data RTRW sebagai bahan penyusunan RDTRW.</li><li>2. Pengendalian dan penataan pemanfaatan ruang.</li><li>3. Koordinasi antar instansi terkait untuk peyebarluasan informasi RTRW kepada publik.</li></ol>	
--	---	---	--



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan bidang infrastruktur pekerjaan umum, maka dalam tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan 24 program, terdiri dari 4 program rutin, 20 program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>TUJUAN</b>																		
	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap-		Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	51.21 %	55.5 %	354.995.291.900	61%	237.561.103.555	66.5 %	160.298.253.300	71.5 %	190.826.783.600	75%	213.624.322.800	%	1.157.305.755.155			
			Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	72.22 %	75.22 %		78.22 %		81.22 %		84.22 %		87.22 %		%				
	<b>SASARAN STRATEGIS</b>																		
	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		Persentase jalan dengan kondisi mantap Persentase jembatan dengan kondisi mantap	51.21 % 72.22 %	55.5 % 75.22 %	354.995.291.900	62% 78.22 %	237.561.103.555	68% 81.22 %	160.298.253.300	74% 84.22 %	190.826.783.600	80% 87.22 %	213.624.322.800	80% %	1.157.305.755.155			
0	<b>NON URUSAN</b>																		
0 1	Non Urusan																		
0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	100%	1.403.184.900	100%	1.035.829.995	100%	1.120.215.300	100%	1.217.360.300	100%	1.331.587.800	100%	6.108.178.295			OPD
0 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	240 Surat	240 Surat	10.600.000	240 Surat	10.600.000	240 Surat	11.600.000	240 Surat	12.800.000	240 Surat	14.000.000	1200 Surat	59.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telpn, Air, Listrik dan Internet	48 Rekening	48 Rekening	38.400.000	72 Rekening	64.320.000	72 Rekening	64.320.000	72 Rekening	64.320.000	72 Rekening	64.320.000	336 Rekening	295.680.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya, Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya	10 Unit	11 Unit	27.447.000	11 Unit	8.895.300	11 Unit	8.895.300	11 Unit	8.895.300	11 Unit	8.895.300	66 Unit	63.028.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya buku cek administrasi keuangan	Jumlah Buku Cek	4 Buku	4 Buku	100.000	4 Buku	200.000	4 Buku	220.000	4 Buku	240.000	4 Buku	260.000	20 Buku	1.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah Jenis Alat Kebersihan	1 Orang	1 Orang	5.730.000	1 Orang	6.016.500	1 Orang	6.600.000	1 Orang	7.280.000	1 Orang	8.000.000	5 Orang	33.626.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK	48 Jenis	48 Jenis	33.951.500	49 Jenis	37.648.500	48 Jenis	39.200.000	48 Jenis	43.150.000	48 Jenis	47.500.000	241 Jenis	201.450.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan, Jumlah Jenis Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	38.525.000	8 Jenis	40.451.250	8 Jenis	44.500.000	8 Jenis	48.950.000	8 Jenis	53.850.000	40 Jenis	226.276.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	4 Jenis	4 Jenis	1.500.000	4 Jenis	2.500.000	4 Jenis	2.750.000	4 Jenis	3.025.000	4 Jenis	3.327.500	20 Jenis	13.102.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	4.350.000	4 SKHU	4.750.000	4 SKHU	5.250.000	20 SKHU	22.270.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Kali	12 Kali	7.200.000	12 Kali	7.200.000	12 Kali	7.920.000	12 Kali	8.750.000	12 Kali	9.500.000	60 Kali	40.570.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	96.800.000	12 Bulan	106.450.000	60 Bulan	488.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Terlaksananya propaganda/publikasi/pameran	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	1 Kali	7.626.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	16.500.000	1 Kali	18.150.000	1 Kali	19.965.000	5 Kali	77.241.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12.600.000	12 Bulan	12.600.000	12 Bulan	13.860.000	12 Bulan	15.250.000	12 Bulan	16.770.000	60 Bulan	71.080.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 1 38	Biaya Operasional Kantor UPTD	Terlaksananya operasional Kantor UPTD	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPT	12 Bulan	12 Bulan	1.120.545.400	12 Bulan	731.438.445	12 Bulan	804.500.000	12 Bulan	885.000.000	12 Bulan	973.500.000	60 Bulan	4.514.983.845	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	50%	60%	36.707.807.000	70%	15.644.587.700	80%	12.150.000.000	90%	16.677.050.000	100%	20.770.705.000	100%	101.950.149.700			Tersebar
0 1 2 2	Pembangunan Rumah Dinas	Terbanggunya rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	0 Gedung	0 Gedung	0	2 Gedung	820.000.000	2 Gedung	960.000.000	2 Gedung	1.152.000.000	2 Gedung	1.500.000.000	8 Gedung	4.432.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Terbanggunya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	40 Gedung	4 Gedung	8.200.000.000	6 Gedung	8.325.000.000	2 Gedung	6.840.000.000	2 Gedung	8.208.000.000	2 Gedung	10.000.000.000	12 Gedung	41.573.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar	
0 1 2 10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor	Jumlah meja kerja, Jumlah kursi kerja	Unit	Unit	0	122 Unit	153.000.000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	100 Unit	153.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	OPD	
0 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	55.000.000	1 Gedung	60.500.000	1 Gedung	66.550.000	1 Gedung	73.205.000	5 Gedung	305.255.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	198.807.000	11 Unit	218.687.700	11 Unit	240.500.000	11 Unit	264.500.000	11 Unit	291.000.000	54 Unit	1.213.494.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 2 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah komputer yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	9.000.000	12 Unit	14.400.000	12 Unit	10.400.000	12 Unit	11.500.000	12 Unit	12.500.000	60 Unit	57.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit	
0 1 2 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	40 Gedung	2 Gedung	4.750.000.000	2 Gedung	2.000.000.000	2 Gedung	1.800.000.000	2 Gedung	3.000.000.000	2 Gedung	4.000.000.000	10 Gedung	15.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar	
0 1 2 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	40 Gedung	4 Gedung	20.800.000.000	4 Gedung	3.510.000.000	2 Gedung	1.638.600.000	2 Gedung	3.250.000.000	2 Gedung	4.000.000.000	10 Gedung	33.198.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar	
0 1 2 58	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor	Terlaksananya perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun	40 Dokumen	8 Dokumen	2.700.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	432.000.000	12 Dokumen	3.952.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar	
0 1 2 92	Pengadaan Peralatan Komputer	Tersedianya peralatan komputer kantor	Jumlah komputer, jumlah printer	Unit	Unit	0	8 Unit	33.500.000	Unit	0	1 Unit	4.500.000	Unit	0	2 Unit	38.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	OPD	
0 1 2 93	Pengadaan Laptop	Terpenuhinya kebutuhan komputerisasi kantor	Jumlah laptop	Unit	Unit	0	7 Unit	105.000.000	Unit	0	Unit	0	2 Unit	30.000.000	7 Unit	135.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	OPD	
0 1 2 96	Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah	terlaksananya inventarisasi bangunan gedung pemerintah	Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun	40 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	432.000.000	4 Dokumen	1.342.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kab. Lampung Barat	



			meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan SASARAN STRATEGIS	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	55%	75%	16.971.631.500	95%	5.001.210.615	96%	6.277.500.000	97%	7.038.000.000	98%	9.528.400.000	%	44.816.742.115				
			Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	55%	75%	16.971.631.500	75%	5.001.210.615	75%	6.277.500.000	100%	7.038.000.000	100%	9.528.400.000	%	44.816.742.115				
1	3		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	3	16	Perencanaan Tata Ruang	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan Dokumen	30%	80%	500.000.000	85%	321.210.615	90%	1.261.500.000	95%	1.018.800.000	100%	1.202.560.000	100%	4.304.070.615	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kab. Lampung Barat	
1	3	16	25	Penyusunan RDTR Kota/Kecamatan	Tersusunnya RDTR Kota/Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	576.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.556.000.000	Rakyat		
1	3	16	27	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksanana koordinasi perencanaan tata ruang	Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	151.210.615	12 Bulan	181.500.000	12 Bulan	217.800.000	12 Bulan	261.360.000	48 Bulan	811.870.615	Rakyat	Tersebar	
1	3	16	29	Rancangan Perda RDTR	Tersusunnya PERDA RDTR	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	691.200.000	2 Dokumen	1.091.200.000	Rakyat	Tersebar	
1	3	16	30	Persiapan Perda RTRW	terlaksananya persiapan perda RTRW	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	845.000.000	Rakyat	Lampung Barat	
1	3	21	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang	persentase jumlah masyarakat yang memahami aturan pemanfaatan ruang	80%	85%	150.000.000	90%	180.000.000	92%	216.000.000	94%	259.200.000	96%	311.040.000	96%	1.116.240.000			
1	3	21	7	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang	Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang	80 Orang	120 Orang	150.000.000	120 Orang	180.000.000	120 Orang	216.000.000	120 Orang	259.200.000	120 Orang	311.040.000	600 Orang	1.116.240.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																		
2			Pertanahan																		
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Menurunnya jumlah konflik pertanahan	Persentase tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat	32%	43.32 %	16.321.631.500	54.64 %	4.500.000.000	65.96 %	4.800.000.000	77.28 %	5.760.000.000	85%	8.014.800.000	85%	39.396.431.500		Tersebar	
					Persentase penanganan permasalahan tanah	20%	20%		30%		40%		50%		60%	60%				Tersebar	
2	4	16	1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab LB)	terlaksananya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah persil tanah yang ditata	0 Percil	135 Percil	463.590.000	135 Percil	735.000.000	135 Percil	882.000.000	135 Percil	1.058.400.000	135 Percil	1.270.080.000	675 Percil	4.409.070.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2	4	16	4	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB	Tersedianya tanah untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah luas tanah yang diadakan	0 Ha	2 Ha	15.000.000.000	2 Ha	2.780.000.000	2 Ha	2.736.000.000	2 Ha	3.283.200.000	2 Ha	5.000.000.000	10 Ha	28.799.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2	4	16	7	Perencanaan Pengadaan Tanah	Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah	Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	108.000.000	1 Dokumen	129.600.000	1 Dokumen	155.520.000	5 Dokumen	553.120.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2	4	16	12	Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah	terlaksananya inventarisasi Alas Hak Tanah Pemerintah	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	0 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	196.000.000	1 Dokumen	235.200.000	1 Dokumen	282.240.000	1 Dokumen	338.688.000	5 Dokumen	1.212.128.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2	4	16	13	Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht	terlaksananya inventarisasi tanah eks. Erfpacht	Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi	0 Dokumen	1 Dokumen	148.041.500	1 Dokumen	179.000.000	1 Dokumen	214.800.000	1 Dokumen	257.760.000	1 Dokumen	309.312.000	5 Dokumen	1.108.913.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit
2	4	16	14	Sosialisasi dan inventarisasi Calon Lokasi PTSL untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Terlaksananya Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap	Jumlah orang yang menerima penyuluhan	0 Orang	5000 Orang	400.000.000	5000 Orang	400.000.000	5000 Orang	480.000.000	5000 Orang	576.000.000	5000 Orang	691.200.000	2500 Orang	2.547.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
2	4	16	15	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Terlaksananya Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	0 Kasus	3 Kasus	80.000.000	3 Kasus	120.000.000	3 Kasus	144.000.000	3 Kasus	172.800.000	3 Kasus	250.000.000	15 Kasus	766.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
			TUJUAN																		
			Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase rumah layak huni	9.27 %	15.49 %	177.638.250.000	20.65 %	57.132.789.385	25.81 %	62.271.062.000	30.97 %	77.596.901.700	36.13 %	110.885.802.500	%	485.524.805.585				
			SASARAN STRATEGIS	Persentase pemukiman layak huni	59.92 %	70.83 %		81.35 %		84.23 %		89.81 %		95.53 %		%					
			Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat	59.92 %	71.25 %	169.325.250.000	78.27 %	52.563.387.685	85.29 %	57.693.660.300	91.01 %	73.010.700.000	98,17%	106.289.920.800	%	458.882.918.785				
1	3		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	3	19	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar	meningkatnya penanganan air limpasan dan tanah labil	Persentase penanganan lokasi genangan air	5%	5%	44.340.000.000	5%	3.125.000.000	5%	5.300.000.000	5%	8.360.000.000	5%	10.432.000.000	25%	71.557.000.000			
					Persentase penanganan lokasi rawan longsor	65%	70%		75%		80%		85%		90%	90%					
1	3	19	1	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	216.000.000	2 Dokumen	259.200.000	10 Dokumen	1.255.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	19	3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong/trotoar	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar	14 Lokasi	1 Lokasi	30.825.000.000	2 Lokasi	1.550.000.000	2 Lokasi	2.500.000.000	2 Lokasi	4.000.000.000	2 Lokasi	5.000.000.000	9 Lokasi	43.875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	19	11	Perencanaan turap/talud/bronjong	Tersedianya Dokumen Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun	0 Dokumen	4 Dokumen	215.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	172.800.000	8 Dokumen	751.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	19	12	Pembangunan turap/talud/bronjong	Terbangunnya Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun	5 Lokasi	2 Lokasi	12.850.000.000	2 Lokasi	1.325.000.000	3 Lokasi	2.500.000.000	3 Lokasi	4.000.000.000	3 Lokasi	5.000.000.000	23 Lokasi	25.675.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Terpenuhinya Target Pemerintah 100-0-100	Persentase peningkatan sanitasi layak	4%	4%	29.328.250.000	3,50%	11.796.500.000	3,50%	13.291.500.000	3,50%	14.575.500.000	3,50%	17.568.300.000	18%	86.560.050.000			
					Persentase peningkatan air minum layak	3,90%	3,90%		3,90%		3,90%		3,90%		3,90%		19,50%				
1	3	41	2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	terbangunnya prasarana dan sarana air limbah	Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan	78 Lokasi	11 Lokasi	1.500.000.000	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	11 Lokasi	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar

1	3	41	16	Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun	68 Dokumen	8 Dokumen	840.000.000	4 Dokumen	650.000.000	4 Dokumen	780.000.000	4 Dokumen	936.000.000	4 Dokumen	1.123.200.000	24 Dokumen	4.329.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	20	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air Minum	Terbangun dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang dibangun dan dipelihara	1 Lokasi	1 Lokasi	5.681.505.000	2 Lokasi	1.500.000.000	2 Lokasi	1.800.000.000	2 Lokasi	2.160.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	8 Lokasi	14.141.505.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	73 Lokasi	3 Lokasi	2.395.000.000	1 Lokasi	2.000.000.000	3 Lokasi	2.400.000.000	3 Lokasi	2.880.000.000	3 Lokasi	4.500.000.000	13 Lokasi	14.175.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	25	DAK Penugasan Bidang Air Minum	terbangunnya prasarana dan sarana air bersih	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	0 Lokasi	0 Lokasi	0	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	8 Lokasi	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	27	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi	Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan	0 Lokasi	0 Lokasi	0	10 Lokasi	2.099.800.000	10 Lokasi	2.099.800.000	10 Lokasi	2.099.800.000	10 Lokasi	2.099.800.000	40 Lokasi	8.399.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	28	DAK Reguler Bidang Sanitasi	terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi	Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan	0 Lokasi	9 Lokasi	5.032.634.000	10 Lokasi	438.900.000	10 Lokasi	438.900.000	10 Lokasi	438.900.000	10 Lokasi	438.900.000	49 Lokasi	6.788.234.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	29	Pendamping Pamsimas	terlaksananya pendampingan kegiatan Pamsimas	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi	0 Lokasi	3 Lokasi	1.150.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000	3 Lokasi	1.440.000.000	3 Lokasi	1.728.000.000	3 Lokasi	2.073.600.000	15 Lokasi	7.591.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	30	DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi	Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan	25 Lokasi	25 Lokasi	7.285.000.000	15 Lokasi	2.575.000.000	15 Lokasi	3.000.000.000	15 Lokasi	3.000.000.000	15 Lokasi	3.000.000.000	85 Lokasi	18.860.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	31	DAK Reguler Bidang Air Minum	terbangunnya prasarana dan sarana air bersih	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	0 Lokasi	5 Lokasi	5.444.111.000	2 Lokasi	432.800.000	2 Lokasi	432.800.000	2 Lokasi	432.800.000	2 Lokasi	432.800.000	13 Lokasi	7.175.311.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	41	32	DAK Afirmasi Bidang Air Minum	terbangunnya prasarana dan sarana air bersih	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	0 Lokasi	0 Lokasi	0	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	2 Lokasi	450.000.000	8 Lokasi	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	46		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya infrastruktur perdesaan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	32,68 %	45,75 %	93.157.000.000	61,44 %	28.601.387.685	77,13 %	29.602.160.300	87,59 %	39.685.200.000	98,83 %	66.901.620.800	98,83 %	257.947.368.785	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	46	2	Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan	Terbangunnya jalan lingkungan perdesaan	Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun	108 KM	50 KM	86.000.000.000	60 KM	23.550.000.000	60 KM	22.105.760.300	40 KM	30.974.000.000	43 KM	56.752.660.800	253 KM	219.382.421.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	46	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan	Terlaksananya jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan perdesaan dan jembatan perdesaan yang direhab	0 Lokasi	5 Lokasi	3.825.000.000	10 Lokasi	1.450.000.000	15 Lokasi	4.800.000.000	15 Lokasi	5.760.000.000	10 Lokasi	6.912.000.000	55 Lokasi	22.747.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	46	10	Penyusunan Database Jalan Lingkungan	Tersedianya dokumen database jalan lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	333.987.685	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	432.000.000	1 Dokumen	518.400.000	5 Dokumen	1.944.387.685	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kab. Lampung Barat
1	3	46	34	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	6 Dokumen	345.000.000	6 Dokumen	414.000.000	6 Dokumen	496.800.000	6 Dokumen	596.160.000	25 Dokumen	2.451.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SKPD
1	3	46	35	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	Terbangunnya jalan lingkungan perdesaan	Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun	LS	1 LS	2.032.000.000	1 LS	1.422.400.000	1 LS	1.422.400.000	1 LS	1.422.400.000	1 LS	1.422.400.000	1 LS	7.721.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	46	36	Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung Kopi	terlaksananya peningkatan sarana/prasarana kampung kopi	Jumlah lokasi prasarana kampung kopi yang dibangun	0 LS	3 LS	400.000.000	1 LS	1.500.000.000	1 LS	500.000.000	1 LS	600.000.000	1 LS	700.000.000	7 LS	3.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekon Riginis Jaya
1	3	57		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum	Meningkatnya kualitas fasilitas umum	Persentase Fasilitas Umum dalam kondisi baik	0%	50%	2.500.000.000	55%	9.040.500.000	60%	9.500.000.000	65%	10.390.000.000	70%	11.388.000.000	70%	42.818.500.000		
						Persentase prasarana pendamping KRL terbangun	65%	70%		75%		80%		85%		90%	90%				
1	3	57	1	Rehabilitasi Masjid	terlaksananya rehabilitasi fasilitas rumah ibadah	Jumlah masjid yang direhab	0 Unit	0 Unit	0	7 Unit	6.000.000.000	3 Unit	5.500.000.000	3 Unit	5.750.000.000	3 Unit	6.000.000.000	19 Unit	23.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	57	2	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	432.000.000	4 Dokumen	1.542.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lampung Barat
1	3	57	3	Pembangunan/Penataan Taman	terbangunnya fasilitas taman	Jumlah lokasi taman yang dibangun	1 Lokasi	0 Lokasi	0	1 Lokasi	1.475.000.000	1 Lokasi	1.300.000.000	1 Lokasi	1.400.000.000	1 Lokasi	1.500.000.000	4 Lokasi	5.675.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	57	4	Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa	Terbangunnya prasarana pendamping Kebun Raya Liwa	Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun	2 Lokasi	1 Lokasi	2.500.000.000	1 Lokasi	1.115.500.000	1 Lokasi	2.400.000.000	1 Lokasi	2.880.000.000	1 Lokasi	3.456.000.000	5 Lokasi	12.351.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kec. Balik Bukit
				SASARAN STRATEGIS																	
				Meningkatnya kualitas perumahan		Persentase rumah layak huni	90%	90,56%	8.313.000.000	91,11%	4.569.401.700	91,67%	4.577.401.700	92,23%	4.586.201.700	92,79%	4.595.881.700	%	26.641.886.800		
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya tingkat kelayakan hunian Masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	9,27 %	15,49 %	1.900.000.000	20,65 %	0	25,81 %	0	30,97 %	0	36,13 %	0	36,13 %	1.900.000.000		Tersebar
1	4	15	6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terfasilitasi dan terstimulasinya pembangunan rumah MBR	Jumlah rumah MBR yang terbangun	0 Rumah	100 Rumah	1.900.000.000	0 Rumah	0	Rumah	0	Rumah	0	Rumah	0	Rumah	1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	4	23		Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya tingkat kelayakan hunian Masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	9,27 %	15,49 %	6.413.000.000	20,65 %	4.569.401.700	25,81 %	4.577.401.700	30,97 %	4.586.201.700	36,13 %	4.595.881.700	36,13 %	24.741.886.800		Tersebar
1	4	23	2	DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	terlaksananya rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi MBR	Jumlah rumah MBR yang rehabilitasi	317 Rumah	500 Rumah	6.413.000.000	500 Rumah	4.489.401.700	500 Rumah	4.489.401.700	500 Rumah	4.489.401.700	500 Rumah	4.489.401.700	2500 Rumah	24.370.606.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	4	23	3	Koordinasi Pelaksanaan Perumahan Swadaya	terlaksananya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	terlaksananya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	15 Kec	Kec	0	15 Kec	80.000.000	15 Kec	88.000.000	15 Kec	96.800.000	15 Kec	106.480.000	15 Kec	371.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	tersebar
				TUJUAN																	
				Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi berfungsi*		Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	42%	45%	133.090.407.000	49%	38.344.000.000	53%	46.471.900.000	56%	55.075.380.000	60%	62.625.300.000	%	335.606.987.000		
				SASARAN STRATEGIS																	
				Meningkatnya kualitas jaringan irigasi		Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	42%	45%	133.090.407.000	49%	38.344.000.000	53%	46.471.900.000	56%	55.075.380.000	60%	62.625.300.000	%	335.606.987.000		
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	3	34		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya luas cakupan jaringan irigasi	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi baik	4%	3%	90.340.407.000	4%	21.544.500.000	4%	23.862.500.000	3%	27.884.100.000	4%	32.706.020.000	18%	196.337.527.000		Tersebar

1	3	34	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)	terlaksananya pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara	724 Ha	834 Ha	1.500.000.000	834 Ha	1.500.000.000	834 Ha	2.800.000.000	834 Ha	3.160.000.000	834 Ha	4.592.000.000	4894 Ha	13.552.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	20	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	0 Lokasi	35 Lokasi	27.750.007.000	35 Lokasi	13.954.500.000	35 Lokasi	13.954.500.000	35 Lokasi	13.954.500.000	35 Lokasi	13.954.500.000	175 Lokasi	83.568.007.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	22	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	420 Ha	100 Ha	55.000.000.000	100 Ha	3.450.000.000	100 Ha	4.140.000.000	100 Ha	5.968.000.000	100 Ha	7.961.600.000	920 Ha	76.519.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	30	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa	Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun	0 Ha	110 Ha	3.500.000.000	150 Ha	1.500.000.000	150 Ha	1.800.000.000	200 Ha	3.160.000.000	100 Ha	4.592.000.000	600 Ha	14.552.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	31	Perencanaan Teknis Bidang Pengairan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pengairan	Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun	40 Dokumen	12 Dokumen	640.400.000	7 Dokumen	640.000.000	12 Dokumen	768.000.000	12 Dokumen	921.600.000	12 Dokumen	1.105.920.000	61 Dokumen	4.075.920.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	32	Melaksanakan Survey, Investigasi dan Perencanaan Detil (SID) Sarana Prasarana SDA	Tersedianya dokumen pengembangan sarana prasarana SDA	Jumlah dokumen sarana prasarana SDA yang di SID	0 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	2.850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	34	33	Pembuatan Peta Geospasial Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya kualitas jaringan irigasi dan pengendalian daya rusak air	Jumlah Peta Geospasial Daerah Irigasi yang dibuat	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	720.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.220.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44		Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya pengendalian daya rusak air	Peningkatan luas wilayah bebas banjir	35%	37%	42.750.000.000	39%	16.799.500.000	41%	22.609.400.000	43%	27.191.280.000	45%	29.919.280.000	45%	139.269.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	3	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang direhab	0 Lokasi	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	2 Lokasi	1.000.000.000	2 Lokasi	2.000.000.000	4 Lokasi	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	4	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	terlaksananya pengembangan pengelolaan daerah rawa	Jumlah lokasi pengembangan daerah rawa yang dikelola	Lokasi	Lokasi	0	Lokasi	0	1 Lokasi	1.500.000.000	1 Lokasi	2.000.000.000	1 Lokasi	2.500.000.000	3 Lokasi	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	6	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai	terlaksananya pengendalian banjir	Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan	40 Lokasi	8 Lokasi	33.900.000.000	13 Lokasi	13.799.500.000	8 Lokasi	16.909.400.000	9 Lokasi	19.871.280.000	9 Lokasi	19.371.280.000	47 Lokasi	103.851.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	9	Pembangunan Prasarana Pengaman Danau	Terlaksananya pembangunan prasarana pengaman danau	Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun	21 Lokasi	4 Lokasi	2.600.000.000	2 Lokasi	1.500.000.000	1 Lokasi	1.800.000.000	1 Lokasi	2.160.000.000	1 Lokasi	2.592.000.000	9 Lokasi	10.652.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	20	Rehabilitasi Bangunan Prasarana-sarana Konservasi	Terlaksananya rehabilitasi bangunan prasarana - sarana konservasi	Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab	0 Lokasi	1 Lokasi	5.000.000.000	2 Lokasi	1.500.000.000	1 Lokasi	1.800.000.000	1 Lokasi	2.160.000.000	1 Lokasi	2.592.000.000	6 Lokasi	13.052.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
1	3	44	21	Studi Kelayakan Pengembangan DAS dan Pola Penampungan Aliran Air Permukaan	Tersedianya dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan	Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji	0 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	864.000.000	4 Dokumen	2.714.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersebar
TOTAL							682.695.580.400		338.039.103.555		275.318.715.300		330.537.065.300		396.663.825.300		2.023.254.289.855				

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2017-2022**

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Target Kinerja				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik + sedang}}{\text{panjang jalan kab. di LB}} \times 100\%$	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Jml jembatan kondisi baik + sedang}}{\text{Jml jembatan di LB}} \times 100\%$	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik								
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	%	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi di LB}} \times 100\%$	45,00%	49,00%	53,00%	56,00%	60,00%
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan								
	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase perumahan layak huni	%	$\frac{\text{Jml rumah layak huni}}{\text{Jml Rumah di LB}} \times 100\%$	92,01%	92,57%	93,13%	93,68%	94,24%
	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat	%	$\frac{\text{jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}}$	71,25%	78,27%	85,29%	91,01%	98,17%
				$\frac{\text{jumlah rumah tangga pengguna air bersih} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}}$	82,34%	85,84%	89,34%	92,84%	96,34%
				$\frac{\text{lokasi limpasan air tertangani} \times 100\%}{\text{jumlah lokasi limpasan seluruhnya}}$	76,90%	80,80%	84,70%	88,60%	92,5%
				$\frac{\text{panjang jalan lingkungan kondisi baik} \times 100\%}{\text{panjang jalan lingkungan seluruhnya}}$	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukannya								
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW		$\frac{\text{jml pemanfaatan lahan sesuai RTRW} \times 100\%}{\text{jml pemanfaatan lahan}}$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Liwa, Agustus 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



KANSARI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19640912 199703 1 005

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan Penetapan Indikator Kinerja daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum mulai dari Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD sampai dengan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD. Indikator kinerja ini termuat dalam Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022 adalah “mengembangkan wilayah melalui pembanguna insfrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan bewawasan lingkungan”

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	51,21%	55,50%	62,00%	68%	74%	80%	80,00%
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	72,22%	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%	87,22%
3	Persentase pengendalian daya rusak air	35,00%	37,00%	39,00%	41,00%	43,00%	45,00%	45,00%
4	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	42,00%	45,00%	49,00%	53,00%	56,00%	60,00%	60,00%



5	Persentase pemukiman layak huni	59,92%	70,83%	81,35%	84,23%	89,81%	95,53%	95,53%
6	Persentase rumah layak huni	9,27%	15,49%	20,65%	25,81%	30,97%	36,13%	36,13%
7	Persentase ketaatan RTRW	55,00%	75,00%	95,00%	96,00%	96,00%	97,00%	98,00%
8	Persentase aset tanah pemerintah dan masyarakat tertata	16,00%	31,66%	42,32%	52,98%	63,64%	72,50%	72,50%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Unit Utama dan Unit Kerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2020) dan akhir periode 5 tahun (2022) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.